

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro untuk anak berkebutuhan khusus adalah kurikulum sekolah reguler karena siswa lamban belajar masih dapat mengikuti kurikulum reguler dengan diberikan pembelajaran tambahan untuk meningkatkan hasil belajarnya. Baik siswa berkebutuhan khusus maupun siswa reguler lainnya menerima materi yang sama dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh guru kelas sebelum proses pembelajaran. Guru belum melibatkan pihak lain seperti orang tua atau kepala sekolah untuk merancang kurikulum karena kurikulum yang digunakan untuk siswa berkebutuhan khusus masih sama dengan siswa lainnya.

Pelaksanaan pendidikan yang berjalan saat ini masih menunjukkan program pembelajaran yang sama diberlakukan untuk semua peserta didik. Peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik lainnya dengan program yang telah dirancang oleh guru kelas. Guru menggunakan metode dan pendekatan yang sama kepada setiap peserta didik dan menggunakan media

pembelajaran dalam menyampaikan materi. Program yang diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus setiap tahunnya diganti oleh kelas yang lainnya, jadi program yang diberikan tidak berkelanjutan. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memerlukan pelayanan khusus selama dia menempuh pendidikan di sekolah inklusi, jadi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti program inklusi sebaiknya diberikan secara berkelanjutan.

Proses penilaian dan kenaikan kelas di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro mengacu pada standar kurikulum nasional. Siswa berkebutuhan khusus mengikuti proses penilaian yang sama dengan siswa reguler lainnya, sistem evaluasi antara lain ulangan harian, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Kenaikan Kelas, dan Ujian Nasional. Anak berkebutuhan khusus mempunyai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang sama dengan siswa lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada ulangan harian tambahan yang dilakukan peserta didik pada saat jam belajar tambahan pada siang hari. Adanya perbedaan tingkat kedalaman materi yang lebih rendah dibandingkan pada saat ulangan harian bersama peserta didik lainnya, memungkinkan nilai siswa menjadi lebih tinggi sehingga dapat mencapai KKM. Laporan hasil belajar siswa berkebutuhan khusus menggunakan nilai angka atau kuantitatif.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro memiliki faktor pendukung antara lain sekolah masih berkomitmen untuk melaksanakan program inklusi, masih ada siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah tersebut, dukungan pemerintah terhadap program ini dengan memberikan

bantuan dana masih berjalan, guru-guru masih konsisten melaksanakan program inklusi ini, tersedia media pembelajaran yang dapat mendukung dalam proses KBM.

Sedangkan yang masih menjadi faktor penghambat pelaksanaan program ini antara lain masih ada sebagian orang tua yang tidak peduli terhadap program inklusi, media pembelajaran yang masih kurang, kurangnya Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah ini, pengetahuan guru tentang cara mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang, dan sebagian orang tua belum konsisten dalam mendukung program inklusi ini.

5.2 Implikasi

Implikasi dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang merupakan konsekuensi untuk mencapai kondisi ideal dalam melaksanakan program pendidikan inklusif di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro, supaya program ini dapat terlaksana dengan baik. Implikasi dari penelitian ini antara lain kepala sekolah rajin mengajukan kekurangan tenaga baik guru atau karyawan ke dinas pendidikan dan dinas pendidikan pun perlu adanya pemetaan kekurangan dan kelebihan guru, karyawan khususnya untuk tingkat SMP agar penyebaran guru merata, sehingga guru dan karyawan di setiap sekolah terpenuhi, terutama dalam membimbing anak berkebutuhan khusus.

Sekolah perlu meningkatkan manajemen pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sehingga *input* siswa dapat berbeda dengan sebelumnya jadi harus lebih giat lagi membuat program-program peningkatan mutu akademik agar dapat

mempertahankan prestasi dan anak berkebutuhan khusus dapat belajar mandiri, untuk mendukung hal tersebut kepala sekolah dengan komite harus lebih giat lagi dalam mengelola dan mencari peluang sumber dana baik ke orang tua yang mampu, donatur dan ke Dinas Pendidikan untuk mengajukan program sekolah sehingga mampu menciptakan iklim sekolah yang kondusif.

Fungsi kepala sekolah dalam pendidikan inklusif sudah baik menjalankan fungsinya, penataan administrasi dan lingkungan sekolah yang sudah berjalan sesuai aturan sehingga warga sekolah termotivasi untuk berinovasi dan bekerja lebih baik lagi namun demikian ada hal yang perlu ditingkatkan yaitu peningkatan mutu guru melalui pendidikan formal dengan membuat program pada komite untuk membantu meringankan biaya pendidikan, memberi tugas untuk mengikuti MGMP, dan mengikutkan pelatihan-pelatihan dengan instansi terkait terutama dalam hal pelatihan untuk membina anak berkebutuhan khusus.

5.3 Saran

Manajemen pendidikan inklusi yang baik diharapkan dapat menjadikan penyelenggaraan pendidikan inklusi berjalan dengan optimal. Pendidikan inklusi merupakan kebijakan pemerintah pusat, sedangkan kewenangan pelaksanaan ada pada pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah pusat diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah agar satuan pendidikan sebagai pelaksana dapat memahami baik secara konsep maupun praktek agar peserta didik dapat ditangani dengan optimal di sekolah reguler. Sehubungan dengan ini maka disarankan oleh peneliti sebagai berikut:

5.3.1 Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Metro

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat lebih berperan aktif dalam mendukung implementasi sistem pendidikan inklusi. Walaupun kebijakan pendidikan inklusi berasal dari pemerintah pusat tetapi pengelolaan pendidikan inklusi di tingkat satuan pendidikan menjadi wewenang pemerintah daerah. Peran Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan adalah melakukan bimbingan kepada sekolah inklusi, sosialisasi yang lebih aktif baik kepada sekolah-sekolah maupun kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, mengadakan pendidikan dan latihan, workshop, dan bimbingan teknis untuk guru reguler pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, menganggarkan bantuan dana bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

5.3.2 Bagi Kepala SMPN 9 dan SMPN 10 Metro

SMPN 9 dan SMPN 10 Metro diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Peran yang dapat ditingkatkan antara lain, melakukan identifikasi dan asesmen untuk mengetahui hambatan dan keunggulan siswa, mensosialisasikan program pendidikan inklusi ini kepada masyarakat seperti mencari peserta didik yang bukan hanya lamban dalam belajar tetapi juga dengan berbagai hambatan yang lain, mengikutsertakan guru kelas reguler seperti *workshop*, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pemahaman guru tentang pendidikan inklusi, penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan memberikan layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di setiap kelas secara berkelanjutan, merancang kurikulum yang digunakan dengan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

5.3.3 Bagi Guru

Guru di SMPN 9 dan SMPN 10 Metro diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan cara mendidiknya dalam kelas yang inklusi. Guru juga diharapkan dapat membuat program pembelajaran yang lebih individual untuk peserta didik berkebutuhan khusus, program pembelajaran yang dirancang adalah program pembelajaran untuk kelas reguler yang dimodifikasi menjadi kelas inklusi.

5.3.4 Bagi Pengawas

Pengawas pembina SMPN 9 dan SMPN 10 Metro diharapkan dapat memberikan supervisi dan bimbingan kepada kepala sekolah dan guru dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan inklusi. Pengawas pembina juga diharapkan menjadi penghubung antara dinas pendidikan dan sekolah sehingga pihak sekolah dapat memberikan saran dan menyampaikan kebutuhan kepada dinas pendidikan melalui pengawas pembina, begitupun sebaliknya dinas pendidikan dapat mengetahui keadaan di sekolah dari laporan pengawas pembina.

5.3.5 Bagi Komite Sekolah

Komite sekolah dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi pertimbangan dan pengontrol dengan memberikan saran bagi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan inklusi, pendukung seperti dengan memberikan bantuan dana dan tenaga pendidik atau tenaga ahli, dan mediator antara pihak sekolah dengan orang tua atau masyarakat, pemerintah atau dalam hal ini dinas pendidikan, serta lembaga formal dan non-formal lainnya.